

## **PERKEMBANGAN KONSEP *SMART CITY* DALAM MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI: STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN**

**Adithya Raidipa Wisesa, Yolanda Isroyanti, Renny Anggarani Nur Prasasti**

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Adithyaraidipa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (*smart city*) dan kota yang layak huni (*liveable city*) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan atau studi literatur dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berasal dari berbagai sumber seperti jurnal atau penelitian terdahulu. Konsep *smart city* yang tertuang pada Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu *frame work smart city* yaitu *livable city* merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek non fisik.

Kata Kunci: Smart City, Reformasi Birokrasi, E-Government.

### **THE DEVELOPMENT OF THE SMART CITY CONCEPT IN THE MOMENTUM OF BUREAUCRATIC REFORM: STUDY IN TANGERANG SELATAN CITY GOVERNMENT**

#### **ABSTRACT**

In order to make South Tangerang City a smart city and a liveable city, of course it needs to be supported by good governance. Governance is more professional, modern, advanced and accountable, so as to provide the best service to the community. This research is a qualitative research using descriptive analysis techniques with literature review or literature study where this research attempts to describe existing phenomena from various sources such as journals or previous research. The smart city concept is contained in the Final Report on the Assessment and Preparation of the Blue Print for the City of South Tangerang. This is based on PP No. 96 of 2012 concerning Implementation of UU No. 25 of 2009 concerning Public Services. One of the smart city frameworks, namely *livable city*, is a term that describes a comfortable city environment and atmosphere as a place to live and as a place for activities that can be seen from various aspects, both physical and non-physical aspects.

Keywords: Smart City, Bureaucratic Reform, E-Government.

## I. Pendahuluan

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mendeklarasikan reformasi birokrasi yang mendasar, progresif, dan berkelanjutan di bidang politik, hukum, administrasi negara, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai pemerintahan yang baik (Supriatna, 2021). Reformasi birokrasi mengharuskan apratur pemerintah mengedepankan kompetensi dan kapabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai *good governance*.

Seiring berjalannya era reformasi, pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan nilai-nilai *good governance*. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat dan daerah. Birokrasi identik dengan lembaga pemerintah, dan memiliki tiga dimensi: organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Dalam pemerintahan, dimensi ini disebut agensi, kepegawaian, dan manajemen yang termasuk elemen administrasi negara.

Reformasi birokrasi Indonesia dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dari segi kelembagaan, sumber daya kelembagaan maupun manajemen. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa: “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, baik dalam tingkat pusat dan daerah. (Wakhid, 2011)

Reformasi birokrasi memiliki berbagai tantangan kedepannya. Tantangan internal akibat pengaruh lingkungan nasional dan lokal yang bersinergi untuk menyikapi lingkungan global dalam rangka multi reformasi terutamadalam bidang pemerintahan berupa KKN, kultur birokrasi feodal, gaya kepemimpinan otoriter, kualitas sistem, struktur dan perilaku birokrasi yang disfungsi, rendahnya kualitas pengetahuan dan keterampilan birokrasi (profesional dan kinerjanya) (Siagian, 1994).

Pengaruh lingkungan global termasuk globalisasi ekonomi feodal, paradigma pemerintahan dan desentralisasi, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, hak asasi manusia, demokratisasi, dan perubahan lingkungan, serta tantangan birokrasi pemerintahan secara internal.

Untuk menyediakan layanan publik, digitalisasi menjadi norma baru dan penting bagi organisasi seperti perusahaan modern dan lembaga pemerintah. Segala sesuatu yang diubah menjadi lebih mudah dilihat dan lebih transparan. Pelayanan publik dilakukan demi kepentingan umum, akan ideal untuk diterapkan dengan teknologi informasi yang lebih efisien. Selain itu, reformasi birokrasi adalah yang paling ideal jika dilakukan dengan mempercepat pemanfaatan dukungan teknologi digital dalam upaya internal untuk reformasi birokrasi.

Menurut data BPS tahun 2020, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) sebagian besar berasal dari data BPS dan data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. IP-TIK Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 5,59, meningkat dibandingkan dengan 2019 sebesar 5,32. Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10, dimana 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada angka 5,07 dan 5,32 pada tahun 2019 dengan skala 0-10. Pada tahun 2018, penetrasi internet berkembang pesat yaitu dari 32,34 % pada tahun 2017 menjadi 39,90 pada tahun 2018. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019- kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesiamencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu (BPS, 2021).

E-government, juga disebut pemerintahan elektronik adalah salah satu perkembangan besar dalam bidang administrasi publik. Ini adalah proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai alat baru untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih efisien dan efektif. Akibatnya, e-government menjadi solusi pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik. Kota-kota di Indonesia telah mengadopsi konsep kota pintar dan dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah perkotaan, termasuk peningkatan jumlah penduduk, kualitas pelayanan yang buruk, penumpukan sampah, kemacetan laulintas, peningkatan tingkat kriminalitas, dan masalah sosial lainnya.

Kota Tangerang Selatan yang didirikan sebagai daerah otonomi baru pada tahun 2008, telah menjadi kota yang responsif terhadap perkembangan konsep pembangunan kota modern seperti kota pintar dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Gagasan smart city menjadi paradigma dan arah pembangunan kota sejak kepemimpinan Airin, terutama selama periode kedua. Smart government dan smart technology adalah komponen penting dari konsep kota pintar. Oleh karena itu, dalam periode kepemimpinan Walikota Airin 2016-2021, penguatan dan adaptasi teknologi informasi menjadi prioritas utama. Selain itu, termasuk elemen reformasi birokrasi yang tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi kota Tangerang selatan 2016–2021.

Menurut arahan yang diberikan oleh Walikota Tangerang Selatan, konsep pengembangan kota pintar berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendeteksi masalah perkotaan dengan cepat dan yang paling penting, untuk mempercepat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (*smart city*) dan kota yang layak huni (*liveable city*) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola yang baik adalah yang mengikuti aturan hukum, berorientasi pada kesepakatan, efektif dan efisien, akuntabel, jelas, responsif, adil, dan inklusif. Aspek pengelolaan pemerintahan umumnya belum menunjukkan hasil optimal ini terbukti dengan banyaknya peraturan yang belum selesai. Selain itu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Opini BPK RI atas laporan keuangan sempat turun dari WTP ke WDP, serta nilai AKIP Kota Tangsel juga masih CC (RPJMD, 2016-2021). Atas dasar itulah upaya untuk mengelaborasi perkembangan Perkembangan Konsep Smart City Dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan menjadisangat menarik untuk diteliti dan dikaji.

## II. Kajian Teori

### A. Smart City

Kota-kota besar di seluruh dunia ingin menjadi kota pintar. Sebenarnya, ada banyak definisi untuk konsep smart city, dan tidak ada yang benar-benar tepat. Ada banyak perspektif yang berbeda tentang apa itu smart city. Kota cerdas adalah upaya manusia untuk membuat kota lebih nyaman dan aman untuk ditinggali dengan melihat masalah yang dihadapi masyarakat dan organisasi saat ini dan menggunakan kemajuan teknologi. (RPJMD, 2016-2021).

### B. Birokrasi

Menurut Ernawan, (1988) Birokrasi berasal dari kata "bureau" yang berarti "meja" atau "kantor", dan "kratia" yang berarti "pemerintah". Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintahkan oleh suatu

kantor melalui kegiatan administrasi. Maka birokrasi dapat dikatakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat.

### C. Reformasi Birokrasi

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta peningkatan kualitas layanan publik adalah tiga substansi pokok tujuan reformasi birokrasi. Seluruh pelaku birokrasi harus memahami hal tersebut sebagai bagian kerja menjalankan pemerintahan dan pembangunan baik di jajaran desa, kecamatan sampai pemerintah kota. Beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut (GDRB, 2010):

1. *Outcomes oriented* yaitu seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur pengawasan, dsbnya.
2. Terukur yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
3. Efisien yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber dayayang ada secara efisien dan profesional.
4. Efektif yaitu reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
5. *Realistik* yaitu *outputs dan outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistis dan dapat dicapai secara optimal.
6. Konsisten yaitu reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.
7. *Sinergi* pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Kegiatan harus memberikan manfaat positif bagi kegiatan lainnya
8. Inovatif yaitu reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best praktis untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
9. Kepatuhan yaitu reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dimonitor yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi harus di monitoring secara lembaga untuk memastikan berbagai tahapan dilakukan dengan baik.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan atau studi literatur dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ataupun penelitian terdahulu.

### IV. Pembahasan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom baru hasil dari pemekaran Kabupaten Tangerang dan secara resmi terbentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Tujuan pemekaran ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan

potensi daerah.

Secara administratif Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, pemerintahan berkelas dunia diharapkan tercapai di tahun 2025. Konsep smart city adalah salah satu penopang utamanya untuk menerapkan e-government. Berbagai kota besar di Indonesia kini mulai menerapkan konsep kota pintar, atau smart city, dan ini menjadi impian semua kota besar di Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai solusi untuk mengawasi lingkungan di lokasi, mengatasi kemacetan kota, dan sampah yang berserakan. Selain itu, tujuan smart city adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk kota. (KEMENPANRB, 2016).

Beberapa prinsip atau indikator yang mengukur konsep *smart city* dalam pencapaian maupun percepatan reformasi birokrasi sebagai berikut:

#### 1. Oriented Outcomes

Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan mencakup konsep smart city. Sudah jelas bahwa mengelola kota untuk menjadi cerdas secara berkelanjutan adalah kewajiban yang tidak dapat dibantah. Ini karena dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep kota cerdas yang mencakup *green city, digital city, liveable city dan sustainable city*. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Fitri Supriyantiwi, 2019). Kota Tangerang Selatan sudah menjanjikan konsep *smart city* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya aplikasi dalam proses pelayanan publik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ketika adanya pandemi covid-19, pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu melakukan inovasi pada Disdukcapil dalam memberikan pelayanan optimal ketika pandemi covid-19 dengan bekerja sama dengan ojek online pada aplikasi Sianduk atau Sistem Pengiriman Dokumen Kependudukan berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, dsbnya.

#### 2. Terukur

Program Tangsel *smart city* mulai dijalankan pada tahun 2015 namun baru mulai di gaungkan pada tahun 2017. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 telah menganugerahkan penghargaan kepada Kota Tangerang Selatan sebagai daerah menuju *smart city* (Saphira, 2019). Penghargaan ini mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus mensosialisasikan Master Plan Smart City kepada masyarakat. Pada tahun 2018, mereka menerima penghargaan indeks Kota Cerdas dari surat kabar terkenal di Indonesia KOMPAS karena berhasil menerapkan konsep kota

cerdas menuju smart city 2021. pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan dan penganugerahan dalam Indonesia award.

### 3. Efisien dan Efektif

Lahirnya Tangsel Smart City di Kota Tangsel diharapkan Walikota Tangsel dapat membuat kinerja Pemkot Tangsel menjadi lebih baik. Pemkot Tangsel ingin masyarakat Tangsel turut terlibat dalam mengetahui serta turut membenahi permasalahan yang ada di Kota Tangsel dengan mudah yaitu melalui aplikasi SIARAN (Saphira, 2019). Reformasi birokrasi juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkecukupan sambil menghemat sumber daya alam. Aplikasi SIARAN, salah satu ide smart city, membantu masyarakat melaporkan keluhan tanpa harus datang ke kantor. Masyarakat hanya dapat menggunakan smartphone untuk melaporkan keluhan dan memantau perkembangan mereka melalui aplikasi tersebut.

### 4. Realistik

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memasang 100 kamera CCTV di lokasi strategis dan rawan kejahatan. Akan ada tambahan kamera CCTV untuk menjaga keamanan di setiap persimpangan jalan dan tempat umum. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan meningkatkan jaringan internet atau Wi-Fi di tempat umum seperti taman kota, puskesmas, dan sekolah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong partisipasi publik untuk mendukung konsep kota pintar (Kompas, 2018).

*Frame work smart people* salah satunya mengenai angka kemiskinan pada suatu kota. Garis kemiskinan Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Garis kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 643.083 rupiah/kapita/bulan. Angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.29% dari total jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adanya pandemi COVID-19 (LPPD, 2020).

### 5. Konsisten

Pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana menghadirkan layanan jaringan super cepat, yakni generasi kelima nirkabel atau biasa disebut dengan 5G. Dalam hal ini untuk pengembangan ekosistem dan *use cases smart city* dibahas dengan Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo. Realisasi layanan 5G di Kota Tangerang Selatan didukung oleh beberapa kelebihan dan keunggulan seperti IPM yang tinggi di atas angka nasional. Hal ini mendukung persentase jumlah pengguna seluler. Adanya realisasi 5G mempercepat *framework livable city*.

### 6. Sinergi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa konsep *smart city* yang dijalankan pemerintah Kota Tangerang Selatan bukan hanya sebatas pada pengembangan teknik informatika (TIK) melainkan lebih spesifik pada enam dimensi, yaitu *smart living (pelayanan)*, *smart society and education* (sosial dan pendidikan), *smart environment* (lingkungan), *smart economy* (ekonomi), *smart government* (pemerintahan), dan *smart branding* (Masterplan Smart City, 2018). Kota Tangerang Selatan melakukan kolaborasi pengembangan konsep sister city dengan Kota Daejeon, Korea Selatan. Hal ini

telah memperlihatkan adanya sinergitas Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan *smart city*.

#### 7. Inovatif

Pemkot Tangerang selatan juga meluncurkan Aplikasi “ TangselPay “ untuk pembayaran restribusi dan perpajakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran”. Aplikasi ini telah mulai diterapkan disemua Instansi Pemerintah di jajaran Kota Tangerang Selatan, namun demikian esensi layanan publik terletak bukan pada kecanggihansarana pelayanan tersebut, tetapi pada pelayanan itu sendiri sangat dibutuhkan faktor komitmen dan kredibilitas orang-orang yang melayani menjadi suatu yang fundamental, dan tuntutan teknologi memainkan peranan penting sebagai hal yang tidak bisa kita tolak untuk mengoptimalkan pelayanan tersebut.

#### 8. Kepatuhan dan Dimonitor

Terkait dengan reformasi birokrasi, Kota Tangerang selatan telah mengeluarkan peraturan walikota nomor 36 tahun 2019 tentang roadmap reformasi birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berdasarkan Roadmap tersebut, Ruang lingkup RMRB Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016–2021, terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu: Bidang Mental Aparatur, Bidang Pengawasan, Bidang Akuntabilitas, Bidang Kelembagaan, Bidang Tatalaksana, Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Bidang Pelayanan Publik.

### V. Penutup

Konsep *smart city* yang tertuang pada Laporan Akhir Kajian Penilaian dan Penyusunan Blue Print Kota Tangerang Selatan. Hal ini didasarkan pada PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu *frame work smart city* yaitu *livable city* merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik maupun aspek non fisik. Pemkot Tangerang Selatan melibatkan masyarakat agar masyarakat mendukung sistem *smart city*. *Frame work smart people* salah satunya mengenai angka kemiskinan pada suatu kota. Sedangkan *frame work smart city* pada pertumbuhan ekonomi, bahwa Trend pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan selama empat tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan yang stabil, dengan rata – rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7.19% tiap tahunnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan masih sebesar 7.35% dengan nilai PDRB sebesar 60.044,980, artinya masih ada gap sebesar 1.65% yang harus dicapai untuk mewujudkan target laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat ini pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini untuk pengembangan ekosistem dan *use cases smart city* dibahas dengan Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo. Realisasi layanan 5G di Kota Tangerang Selatan didukung oleh beberapa kelebihan dan keunggulan seperti IPM yang

tinggi diatas angka nasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwakonsep smart city yang dijalankan pemerintah kota tangerang selatan bukan hanya sebatas pada pengembangan teknik informatika melainkan lebih spesifik pada enam dimensi, yaitu *smart living* , *smart society and education* , *smart environment* , *smart economy* , *smartgovernment* , dan *smart branding*.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perkembangan Konsep Smart City Dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Hal ini menjadikan saran atau masukan yang akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *smart city* belum berjalan optimal dikarenakan banyaknya aplikasi *e-government* tidak berfungsi. Maka dari itu diharapkan SKPD teknis dapat meningkatkan pelayanan dimulai dari sumber daya manusia maupun pembaharuan *software* teknologi.
2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengevaluasi pencapaian kinerja *smart city* sesuai dengan roadmap agar terlihat indikator yang belum tercapai.
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan seharusnya lebih serius dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dalam penggunaan aplikasi yang ada serta memperhatikan kembali seluruh aplikasi yang menjadi bagian dari Tangsel Smart City demi terwujudnya Tangsel Smart City yang lebih baik

## VI. Daftar Pustaka

- Alchholzer, R. S. (2014). *The Impact Of Social Media Use On Local Government Organizational and Public Policy*. New Jersey: Lisa Mahajan-Cusack.
- Alamsyah. 2003. Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Asropi 2008. Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal Ilmu Administrasi, volume V Nomor 3. September 2008.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271.
- Darmawan. 2015. Kinerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Reklame Insidental di Kabupaten Purwakarta. Disertasi Program Pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- BPS. (2021, Oktober 06). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020*. Retrieved from [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/publication/2021/10/06/c17a0162c93579c862278ae6/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2020.html](https://www.bps.go.id/publication/2021/10/06/c17a0162c93579c862278ae6/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2020.html)
- Fitri Supriyantiwi, d. (2019). Implementasi Konsep Smart City Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional HUMANIS*, 16-24.
- GDRB. (2010). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

- KEMENPANRB. (2016, September 02).  
*Smart City, Solusi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Retrieved from [menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menpanrb-smart-city-solusi-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menpanrb-smart-city-solusi-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik)
- Kompas. (2018, Desember 04). *Upaya Tangsel Jadi Smart City pada 2021*. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/>: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/04/09502771/upaya-tangsel-jadi-smart-city-pada-2021?page=all>
- LPPD. (2020). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan: Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Masterplan Smart City. (2018). *Executive Summary Masterplan Smart City Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022*. Tangerang Selatan: Tangerang Selatan.
- RPJMD. (2016-2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021*. Tangerang Selatan: Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan.
- Saphira, A. (2019). Kebijakan Tangsel Smart City Melalui Penggunaan Aplikasi SIARAN di Kota Tangerang Selatan. *repository.uinjkt.ac.id*, 1-109.
- Siagian, S. (1994). *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Supriatna, Y. R. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sepehrdoust, H. (2018). Impact of information and communication technology and anancial development on economic growth of OPEC developing economies. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 40(3), 546–551.
- Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data. *International Journal of Public Administration*, 31(3), 298–316.
- Shirazi, F. (2008). The contribution of ICT to freedom and democracy: An empirical analysis of archival data on the Middle East. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 35(1), 1–24.
- West, D. M. (2004). E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15–27.
- Wakhid, A. A. (2011). *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

